

Executive  
Summary



# SURVEI

## INDEKS KEMERDEKAAN PERS

# 2020



DEWAN **PERS**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

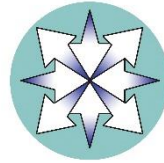
## HASIL SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2020

Sebagai Gambaran  
Kondisi Kemerdekaan Pers di Indonesia selama Tahun 2019

Disiapkan oleh:  
PT SUCOFINDO (PERSERO)



Untuk:  
DEWAN PERS



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang berlimpah, PT. Sucofindo (Persero) telah menyelesaikan kegiatan Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2020.

Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2020 merupakan gambaran dari kondisi kemerdekaan pers periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Survei penyusunan IKP 2020 dilaksanakan di 34 provinsi dengan 9 Informan Ahli (IA) pada setiap provinsi. Sembilan IA tersebut terdiri dari 3 orang dari pengurus aktif organisasi wartawan, 2 orang dari pimpinan perusahaan pers, 2 orang dari unsur pemerintahan, dan 2 orang dari unsur masyarakat.

Karena periode pekerjaan yang bertepatan dengan pandemi Covid-19, kami harus menyesuaikan beberapa proses kegiatan menjadi secara *online* untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Kami merasa sangat terbantu oleh adanya dukungan penuh Dewan Pers dan Sekretariat Dewan Pers serta kerja sama semua Informan Ahli di 34 provinsi dan lima anggota Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council* [NAC]). Berbagai hambatan teknis maupun non teknis dapat teratasi dan akhirnya kami mampu menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu.

Kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Pers atas kepercayaannya memberikan kegiatan Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2020 ini kepada PT. Sucofindo (Persero). Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Sekretariat Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah membantu kami dengan sepenuh hati. Apresiasi dan terimakasih yang tulus kami sampaikan kepada semua Informan Ahli dan anggota NAC yang telah secara profesional dan objektif memberikan penilaian IKP 2020. Bersama Dewan Pers, Anda tercatat dalam perjalanan panjang membangun Pers Indonesia yang Merdeka.

Jakarta, Agustus 2020

# **Penyusunan Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2020**

## **Narasumber FGD**

Mohammad NUH  
Hendry Ch Bangun  
Ahmad Jauhar  
Asep Setiawan  
Arif Zulkifli  
Agung Dharmajaya  
Agus Sudibyo  
Hassanein Rais  
Jamalul Insan  
Winarto  
Artini

## **Sekretariat Dewan Pers**

Sayefudin  
Dra. Deritawati M.si  
Sri Lestari, S.Kom, M.Si  
Maya Novinka Kurnati, SE

## **PT. Sucofindo (persero)**

### **Penanggung Jawab**

Dian Indrawaty

## **Pimpinan Proyek**

Chairul Kahar

## **Anggota**

Andi Saputra  
Nur Shabrina  
Nazar Andriyanto

## **Ketua Tim Peneliti**

Dr. Emilia Bassar, M.Si.

## **Anggota Tim Peneliti**

Dr. Impron, M.Sc.  
Dr. Aryo Subarkah Eddyono, M.Si.  
Ali Imron Hamid, M.I.Kom  
Ratih Siti Aminah, M.Si.  
Aditya Heru Wardhna, MA  
Afut Syafril Nusyirwan, M.I.Kom  
Muhammad Ferdiansyah, S.Stat.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
I. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN METODOLOGI SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020.....	1
II. INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020 PROVINSI: RATA-RATA NILAI IKP 77,67 - BERKATEGORI CUKUP BEBAS .....	4
III. INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020 NASIONAL: NILAI IKP 75,27 - NAIK TIPIS - BERKATEGORI CUKUP BEBAS .....	6
IV. TREN DAN PERINGKAT INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2017 - 2020 .....	8
V. PERBANDINGAN NILAI INDEKS KEMERDEKAAN PERS ANTAR UNSUR RESPONDEN .....	12
VI. ISU-ISU UTAMA INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020.....	13
VII. KETERKAITAN ANTARA INDEKS KEMERDEKAAN PERS DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, INDEKS DEMOKRASI INDONESIA, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 2019 SECARA NASIONAL.....	16
VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020 .....	18
KESIMPULAN.....	18
REKOMENDASI .....	19

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Variabel, Indikator, dan Bobot pada Indeks Kemerdekaan Pers 2020 .....	2
Tabel 2. Dewan Penyelia Nasional (NAC) pada FGD NAC 2020 .....	2
Tabel 3. Selang Nilai dan Kategori Kondisi Kemerdekaan Pers.....	3
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil IKP Rata-Rata Provinsi, NAC dan Nasional.....	7
Tabel 5. Tren dan Peringkat Per Indikator Indeks Kemerdekaan Pers 2017-2020 ....	9
Tabel 6. Tren dan Peringkat IKP 2017-2020 Berdasarkan Provinsi .....	9
Tabel 7. Isu-Isu Utama IKP 2020 .....	13
Tabel 8. Indikator yang Menjadi Isu-Isu Utama IKP 2020 .....	13
Tabel 9. Uji Korelasi Pearson Antara IKP dengan IDI, IPM, dan PPM Tahun 2019 secara Nasional (Sumber data: BPS 2020).....	17

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. IKP 2020 Provinsi Berkategori “Cukup Bebas” .....	4
Gambar 2. Rincian Total IKP 2020 di 34 Provinsi di Indonesia .....	5
Gambar 3. IKP 2020 Nasional Berkategori “Cukup Bebas” .....	6
Gambar 4. Tren dan Peringkat IKP 2017 - 2020 .....	8
Gambar 5. Perbandingan Nilai IKP 2020 Antar Unsur Responden .....	12
Gambar 6. Kuadran Antar Nilai Kondisi Lingkungan IKP .....	16

## I. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN METODOLOGI SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020

**Latar Belakang.** Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) menyebutkan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dari pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen (UU Pers Pasal 15). Berdasar amanat undang-undang ini dan melihat kondisi kemerdekaan pers di Indonesia yang menuntut upaya perbaikan berkesinambungan, Dewan Pers melakukan penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) setiap tahun sejak 2013.

**Tujuan.** Tujuan penyusunan IKP adalah untuk memetakan dan memantau perkembangan pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia, sehingga bisa diidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Sedangkan tujuan pelaksanaan survei IKP 2020 adalah untuk menyusun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2020 yang merupakan gambaran kondisi kemerdekaan pers di 34 provinsi di Indonesia di sepanjang tahun sebelumnya, yaitu dari Januari hingga Desember 2019.

**Metodologi.** Kajian IKP dilakukan dengan metode campuran (*mixed methods*) yaitu metode kuantitatif berupa kuesioner kepada responden dan dilengkapi metode kualitatif berupa wawancara mendalam pada forum *focus group discussion* (FGD).

**Kuesioner.** Kuesioner berisi 75 pernyataan sebagai representasi 75 subindikator yang mewakili 20 indikator pada tiga variabel kondisi lingkungan Indeks Kemerdekaan Pers. Penilaian yang diberikan oleh responden adalah skor antara 1 – 100. Selanjutnya IKP merupakan rata-rata terbobot dari nilai skor yang diberikan oleh responden pada 20 indikator (**Tabel 1.**).

**Responden.** Responden kajian IKP dipilih secara *purposive* dengan kriteria menguasai bidang terkait pers minimal lima tahun dan memiliki pemahaman tentang kemerdekaan pers. Responden di tingkat provinsi adalah sembilan Informan Ahli (IA), sehingga jumlah di seluruh Indonesia adalah 306 IA. Di setiap provinsi, komposisi IA terdiri dari perwakilan pengurus aktif organisasi wartawan (3 orang), pimpinan perusahaan pers (2 orang), unsur pemerintah (2 orang), dan unsur masyarakat (2 orang). Sedangkan responden di tingkat nasional adalah lima anggota Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council* [NAC]) sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.**

**Penilaian IKP Provinsi.** Di setiap provinsi, sembilan IA memberi nilai pada 75 pernyataan di kuesioner. Hasil IKP yang diperoleh melalui pengisian kuesioner kemudian dibahas dalam *focus group discussion* (FGD) dengan peserta utama sembilan IA di masing-masing provinsi, sebagai proses konfirmasi dan triangulasi



terhadap hasil sementara IKP provinsi. Nilai IKP dari 34 provinsi diolah untuk menghasilkan rata-rata nilai **IKP\_Provinsi**.

**Penilaian IKP NAC.** Penilaian IKP oleh lima anggota NAC diberikan hanya pada 20 indikator pada forum FGD. Nilai dari lima anggota NAC menghasilkan rata-rata nilai **IKP\_NAC**.

**Tabel 1. Variabel, Indikator, dan Bobot pada Indeks Kemerdekaan Pers 2020**

No.	Variabel dan Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot
<b>A.</b>	<b>Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik</b>	<b>46,20%</b>
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (4 subindikator)	3,00%
2	Kebebasan dari Intervensi (4 subindikator)	8,00%
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan (3 subindikator)	9,10%
4	Kebebasan Media Alternatif (2 subindikator)	2,70%
5	Keragaman Pandangan dalam Media (3 subindikator)	4,90%
6	Informasi Akurat dan Berimbang (3 subindikator)	6,40%
7	Akses atas Informasi Publik (4 subindikator)	5,30%
8	Pendidikan Insan Pers (1 subindikator)	2,10%
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (6 subindikator)	4,70%
<b>B.</b>	<b>Kondisi Lingkungan Ekonomi</b>	<b>20,40%</b>
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (10 subindikator)	1,50%
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (6 subindikator)	5,10%
3	Keragaman Kepemilikan (1 subindikator)	4,30%
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (3 subindikator)	4,30%
5	Lembaga Penyiaran Publik (7 subindikator)	5,20%
<b>C.</b>	<b>Kondisi Lingkungan Hukum</b>	<b>33,40%</b>
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (4 subindikator)	9,70%
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme (1 subindikator)	2,70%
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (4 subindikator)	6,90%
4	Etika Pers (2 subindikator)	3,90%
5	Mekanisme Pemulihan (6 subindikator)	6,90%
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (1 subindikator)	3,30%
<i>Bobot</i>	<i>Bobot setiap indikator terhadap total 20 indikator kondisi lingkungan</i>	

**Tabel 2. Dewan Penyelia Nasional (NAC) pada FGD NAC 2020**

No.	Nama	Jabatan
1	Hendry Chairudin Bangun	Wakil Ketua Dewan Pers
2	Kemal Effendi Gani	Ketua Forum Pemimpin Redaksi
3	Uni Zulfiani Lubis	Pemimpin Redaksi IDN Times dan Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI)
4	Dr. Ninok Leksono, MA	Rektor Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan Senior Editor Kompas
5	Yosep Adi Prasetyo	Ahli Pers dan Ketua Dewan Pers Periode 2016-2019

**Penilaian IKP Nasional.** IKP Nasional dihitung dari nilai **IKP\_Provinsi** dan nilai **IKP\_NAC** dengan bobot masing-masing 70% dan 30%, dengan formula:

$$IKP\ Nasional = 70\% IKP\_Provinsi + 30\% IKP\_NAC.$$

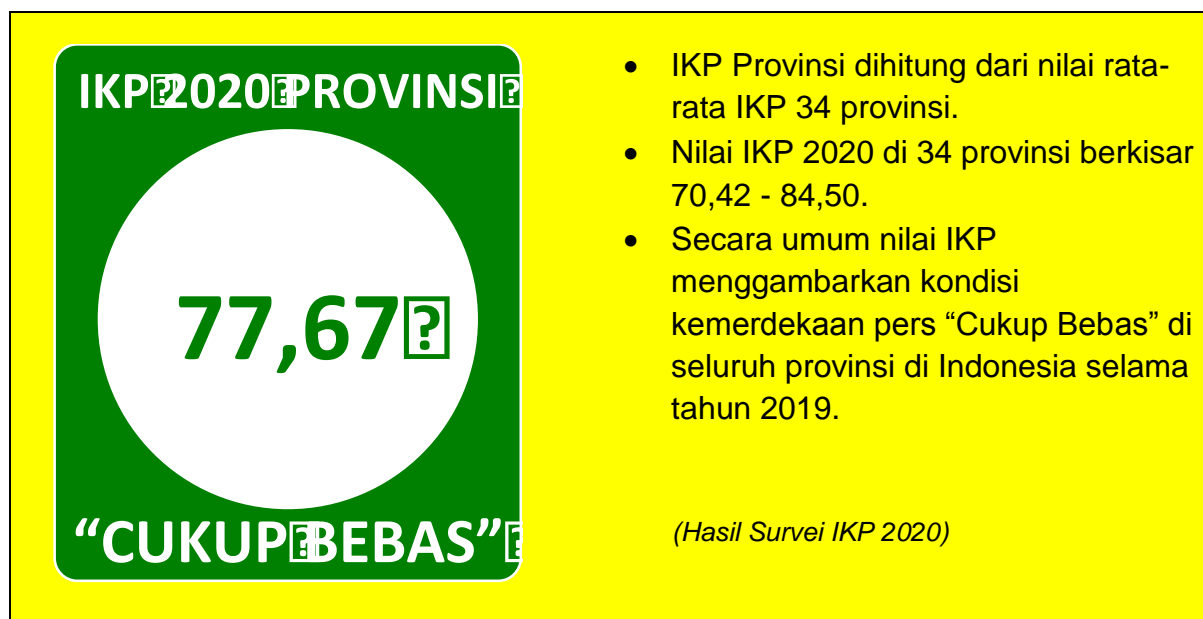
**Kategori Kondisi Kemerdekaan Pers.** Nilai IKP yang diperoleh pada tingkat provinsi maupun nasional dikelompokkan menjadi lima kelas sebagai gambaran kategori kondisi kemerdekaan pers (**Tabel 3.**).

**Tabel 3. Selang Nilai dan Kategori Kondisi Kemerdekaan Pers**

Selang Nilai IKP	Kategori Kondisi Kemerdekaan Pers
90 – 100	Bebas
70 – 89	Cukup Bebas
56 – 69	Agak Bebas
31 – 55	Kurang Bebas
1 – 30	Tidak Bebas

## II. INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020 PROVINSI: RATA-RATA NILAI IKP 77,67 - BERKATEGORI CUKUP BEBAS

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2020 rata-rata dari 34 provinsi adalah 77,67 (**Gambar 1.**). IKP 2020 tersebut diperoleh dari tiga kondisi lingkungan, yaitu Lingkungan Fisik dan Politik dengan nilai 78,21, Lingkungan Ekonomi dengan nilai 77,81, dan Lingkungan Hukum dengan nilai 76,86.



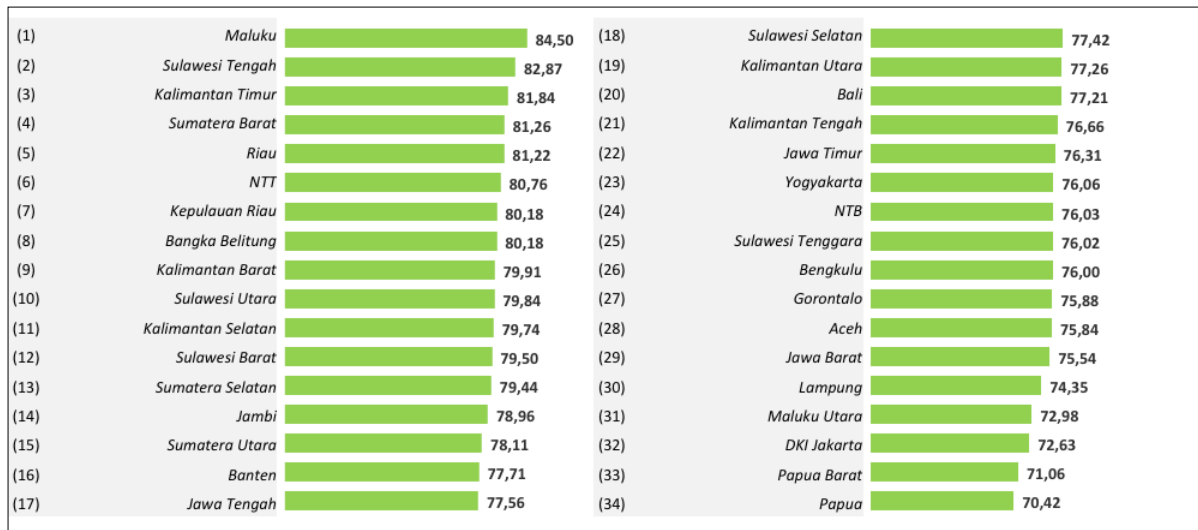
**Gambar 1. IKP 2020 Provinsi Berkategori “Cukup Bebas”**

Antar provinsi, diperoleh rentang nilai IKP antara 70,42 - 84,50 (**Gambar 2.**). Tiga provinsi yang mendapatkan nilai IKP tertinggi adalah Maluku (84,50), Sulawesi Tengah (82,87), dan Kalimantan Timur (81,84). Sementara tiga provinsi yang mendapatkan nilai terendah adalah Papua (70,42), Papua Barat (71,06), dan DKI Jakarta (72,63).

Tingginya nilai IKP Maluku mencerminkan dinamika pers di Maluku yang relatif stabil, dengan semua indikator dalam kondisi kemerdekaan pers “Cukup Bebas”. Sedangkan nilai IKP di Sulawesi Tengah tinggi karena pemerintah daerah memberikan andil dalam pelaksanaan kemerdekaan pers. Sebagai contoh, pemerintah daerah aktif memberikan informasi, menyelenggarakan diskusi, dan memberikan pelatihan pendidikan jurnalistik bagi wartawan di Sulawesi Tengah.

Rendahnya nilai IKP Papua dan Papua Barat ditandai oleh adanya kebijakan pemerintah pusat memblokir internet di wilayah ini pada Agustus 2019 merespons aksi ricuh akibat isu rasialis terhadap sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya. Di dua wilayah ini juga masih terjadi pembatasan terhadap kerja jurnalistik dan intimidasi aparat terhadap wartawan. Situasi DKI Jakarta ditandai adanya upaya aparat keamanan mengamankan rangkaian kegiatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang

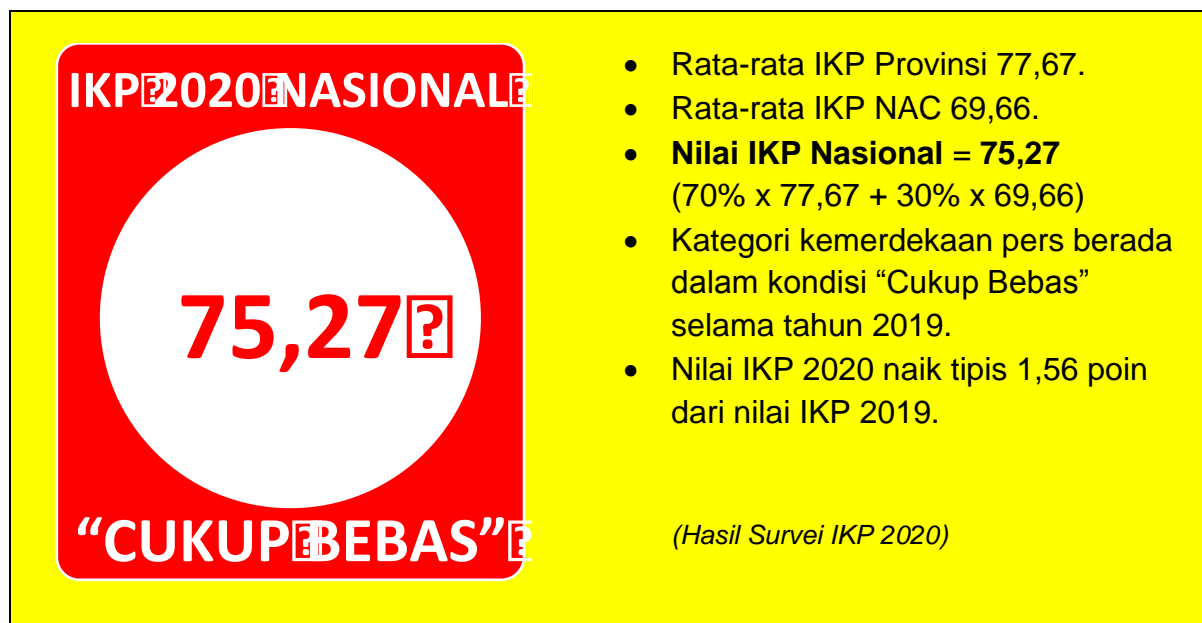
nyatanya turut menyasar wartawan. Menariknya, panasnya dinamika Pilpres 2019 seperti yang dialami DKI Jakarta, tidak dirasakan sama oleh semua provinsi.



**Gambar 2. Rincian Total IKP 2020 di 34 Provinsi di Indonesia**

### III. INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020 NASIONAL: NILAI IKP 75,27 - NAIK TIPIS - BERKATEGORI CUKUP BEBAS

Secara rata-rata, Informan Ahli provinsi memberi nilai yang lebih tinggi (*IKP\_Provinsi* = 77,67) dibandingkan dengan nilai dari NAC (*IKP\_NAC* = 69,66); sehingga diperoleh nilai **IKP Nasional** sebesar **75,27** (**Gambar 3.**).



**Gambar 3. IKP 2020 Nasional Berkategori “Cukup Bebas”**

Rata-rata nilai 20 indikator IKP hasil penilaian dari sembilan Informan Ahli di 34 provinsi dan lima anggota NAC disajikan pada **Tabel 4.**

Nilai IKP 2020 Nasional 75,27 tersebut diperoleh dari tiga kondisi lingkungan, yaitu Lingkungan Fisik dan Politik dengan nilai 76,04, Lingkungan Ekonomi dengan nilai 74,67, dan Lingkungan Hukum dengan nilai 74,75. Hasil IKP tersebut menggambarkan bahwa secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi “Cukup Bebas”.

Nilai IKP 2020 75,27 naik tipis 1,56 poin dibandingkan nilai IKP 2019 yang nilainya 73,71. Meskipun nilai IKP mengalami kenaikan, namun secara kategori, kondisi kemerdekaan tahun 2020 dan 2019 adalah sama yaitu “Cukup Bebas”.

Pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (79,82) dan terendah adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (71,96). Sedangkan pada kondisi Lingkungan Ekonomi, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (79,00) dan terendah adalah Lembaga Penyiaran Publik (76,28). Sementara pada kondisi Lingkungan Hukum, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (74,41) dan terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (63,56).

**Tabel 4. Rekapitulasi Hasil IKP Rata-Rata Provinsi, NAC dan Nasional**

No.	Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot	Rata-Rata Nilai		IKP Nasional <sup>3</sup>
			Provinsi <sup>1</sup>	NAC <sup>2</sup>	
A.	Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	46,2%	78,21	70,98	76,04
B.	Kondisi Lingkungan Ekonomi	20,4%	77,81	67,33	74,67
C.	Kondisi Lingkungan Hukum	33,4%	76,86	69,22	74,57
	<b>Indeks Kemerdekaan Pers Nasional</b>		<b>77,67</b>	<b>69,66</b>	<b>75,27</b>
No.	Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot	Rata-Rata Nilai		IKP Nasional <sup>3</sup>
			Provinsi <sup>1</sup>	NAC <sup>2</sup>	
<b>A.</b>	<b>Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik</b>				
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	3,00%	82,14	74,40	79,82
2	Kebebasan dari Intervensi	8,00%	77,26	69,60	74,96
3	Kebebasan dari Kekerasan	9,10%	77,92	69,40	75,36
4	Kebebasan Media Alternatif	2,70%	78,19	77,60	78,01
5	Keragaman Pandangan	4,90%	75,76	73,80	75,17
6	Akurat dan Berimbang	6,40%	78,95	70,40	76,38
7	Akses atas Informasi Publik	5,30%	80,49	73,20	78,30
8	Pendidikan Insan Pers	2,10%	83,46	71,00	79,72
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	4,70%	74,60	65,80	71,96
<b>B.</b>	<b>Kondisi Lingkungan Ekonomi</b>				
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	1,50%	79,35	78,20	79,00
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	5,10%	74,68	63,60	71,36
12	Keragaman Kepemilikan	4,30%	83,13	69,20	78,95
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	4,30%	73,61	64,40	70,85
14	Lembaga Penyiaran Publik	5,20%	79,49	68,80	76,28
<b>C.</b>	<b>Kondisi Lingkungan Hukum</b>				
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	9,70%	76,22	70,20	74,41
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	2,70%	77,65	71,80	75,90
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	6,90%	81,61	69,40	77,95
18	Etika Pers	3,90%	78,72	62,20	73,77
19	Mekanisme Pemulihan	6,90%	77,65	74,00	76,55
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	3,30%	64,15	62,20	63,56
<i>Keterangan:</i>					
<sup>1</sup>	Rata-rata dari 34 provinsi atas skor yang diberikan oleh sembilan Informan Ahli di setiap provinsi				
<sup>2</sup>	Rata-rata dari skor yang diberikan oleh lima Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council [NAC])				
<sup>3</sup>	IKP Nasional = (70% IKP_Provinsi) + (30% IKP_NAC)				

## IV. TREN DAN PERINGKAT INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2017 - 2020

Selama empat tahun berturut-turut, dari tahun 2017-2020, nilai IKP terus menunjukkan adanya kenaikan (**Gambar 4.**). Nilai IKP 2020 (75,27) mengalami kenaikan sebesar 1,56 poin jika dibandingkan hasil IKP 2019 (73,71). Begitu pula pada tiga kondisi lingkungan IKP 2020 mengalami kenaikan, yaitu Lingkungan Fisik dan Politik sebesar 0,88 poin, Lingkungan Ekonomi sebesar 2,46 poin, dan Lingkungan Hukum sebesar 1,95 poin jika dibandingkan hasil IKP 2019. Lingkungan Ekonomi IKP 2020 mengalami kenaikan paling besar dibandingkan dua lingkungan lainnya.



**Gambar 4. Tren dan Peringkat IKP 2017 - 2020**

Tren nilai rata-rata pada tiga kondisi lingkungan kemerdekaan pers dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sejak 2017 hingga 2020. Jika diurutkan, kondisi lingkungan yang berada pada posisi puncak adalah Lingkungan Fisik dan Politik, disusul Lingkungan Ekonomi, dan terakhir adalah Lingkungan Hukum.

**Tabel 5. Tren dan Peringkat Per Indikator Indeks Kemerdekaan Pers 2017-2020**

NO	INDIKATOR	2017		2018		2019		2020	
		Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat
<b>Lingkungan Bidang Fisik dan Politik</b>									
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	78,40	2	76,56	2	79,41	1	79,82	1
2	Kebebasan dari Intervensi	72,48	9	70,89	10	74,48	11	74,96	14
3	Kebebasan dari Kekerasan	73,07	6	71,49	8	75,31	7	75,36	12
4	Kebebasan Media Alternatif	74,51	5	73,62	5	75,69	6	78,01	6
5	Keragaman Pandangan	73,43	11	70,82	9	74,42	12	75,17	13
6	Akurat dan Berimbang	70,54	12	71,18	11	74,75	9	76,38	9
7	Akses atas Informasi Publik	76,13	4	75,78	3	79,18	2	78,30	5
8	Pendidikan Insan Pers	73,42	8	72,50	7	76,61	4	79,72	2
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	57,81	19	61,73	19	69,27	18	71,96	17
<b>Lingkungan Bidang Ekonomi</b>									
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	72,34	7	70,72	6	74,53	10	79,00	3
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	62,30	18	63,32	18	69,82	17	71,36	18
12	Keragaman Kepemilikan	74,95	3	73,44	4	76,64	3	78,95	4
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	64,22	17	65,81	17	67,80	19	70,85	19
14	Lembaga Penyiaran Publik	68,65	14	69,49	13	73,88	13	76,28	10
<b>Lingkungan Bidang Hukum</b>									
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	66,61	16	67,47	15	73,16	16	74,41	15
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	62,17	13	68,27	14	73,72	14	75,90	11
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	79,73	1	78,84	1	75,86	5	77,95	7
18	Etika Pers	66,53	15	67,27	16	73,7	15	73,77	16
19	Mekanisme Pemulihan	70,88	10	72,51	12	75,08	8	76,55	8
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	34,22	20	43,92	20	56,77	20	63,56	20

**Tabel 6. Tren dan Peringkat IKP 2017-2020 Berdasarkan Provinsi**

Provinsi	IKP			Kenaikan/Penurunan		Kategori			Peringkat		
	2018	2019	2020	2018-2019	2019-2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Maluku	72,14	72,60	84,50	+0,46	+11,90	Baik	Baik	Baik	14	26	1
Sulawesi Tengah	69,65	76,28	82,87	+6,63	+6,59	Sedang	Baik	Baik	21	9	2
Kalimantan Timur	74,18	75,60	81,84	+1,42	+6,24	Baik	Baik	Baik	9	12	3
Sumatera Barat	69,76	73,60	81,26	+3,84	+7,66	Sedang	Baik	Baik	20	24	4
Riau	69,84	79,82	81,22	+9,98	+1,40	Sedang	Baik	Baik	19	3	5
NTT	66,84	73,80	80,76	+6,96	+6,96	Sedang	Baik	Baik	29	22	6
Kepulauan Riau	76,89	77,18	80,18	+0,29	+3,00	Baik	Baik	Baik	4	7	7
Bangka Belitung	74,29	75,30	80,18	+1,01	+4,88	Baik	Baik	Baik	7	16	8
Kalimantan Barat	75,03	76,63	79,91	+1,60	+3,28	Baik	Baik	Baik	6	8	9
Sulawesi Utara	73,32	75,42	79,84	+2,10	+4,42	Baik	Baik	Baik	11	13	10
Kalimantan Selatan	75,36	74,91	79,74	-0,45	+4,83	Baik	Baik	Baik	5	17	11
Sulawesi Barat	68,12	75,78	79,50	+7,66	+3,72	Sedang	Baik	Baik	25	10	12
Sumatera Selatan	78,80	74,82	79,44	-3,98	+4,62	Baik	Baik	Baik	3	18	13
Jambi	72,32	71,76	78,96	-0,56	+7,20	Baik	Baik	Baik	13	27	14
Sumatera Utara	67,16	68,40	78,11	+1,24	+9,71	Sedang	Sedang	Baik	28	32	15
Banten	71,70	73,66	77,71	+1,96	+4,05	Baik	Baik	Baik	15	23	16
Jawa Tengah	67,57	77,84	77,56	+10,27	-0,28	Sedang	Baik	Baik	27	5	17
Sulawesi Selatan	71,17	74,13	77,42	+2,96	+3,29	Baik	Baik	Baik	17	21	18
Kalimantan Utara	80,35	78,79	77,26	-1,56	-1,53	Baik	Baik	Baik	1	4	19
Bali	69,15	77,37	77,21	+8,22	-0,16	Sedang	Baik	Baik	23	6	20
Kalimantan Tengah	80,14	80,18	76,66	+0,04	-3,52	Baik	Baik	Baik	2	2	21
Jawa Timur	61,16	69,68	76,31	+8,52	+6,63	Sedang	Sedang	Baik	31	31	22
Yogyakarta	60,10	69,73	76,06	+9,63	+6,33	Sedang	Sedang	Baik	33	30	23
NTB	69,38	73,40	76,03	+4,02	+2,63	Sedang	Baik	Baik	22	25	24
Sulawesi Tenggara	73,60	84,91	76,02	+11,31	-8,89	Baik	Baik	Baik	10	1	25
Bengkulu	73,31	75,37	76,00	+2,06	+0,63	Baik	Baik	Baik	12	14	26
Gorontalo	70,09	74,47	75,88	+4,38	+1,41	Baik	Baik	Baik	18	19	27
Aceh	74,18	75,61	75,84	+1,43	+0,23	Baik	Baik	Baik	8	11	28
Jawa Barat	68,47	70,65	75,54	+2,18	+4,89	Sedang	Baik	Baik	24	29	29
Lampung	71,45	67,91	74,35	-3,54	+6,44	Baik	Sedang	Baik	16	33	30
Maluku Utara	67,91	75,33	72,98	+7,42	-2,35	Sedang	Baik	Baik	26	15	31
DKI Jakarta	65,18	74,37	72,63	+9,19	-1,74	Sedang	Baik	Baik	30	20	32
Papua Barat	60,42	70,68	71,06	+10,26	+0,38	Sedang	Baik	Baik	32	28	33
Papua	59,80	66,89	70,42	+7,09	+3,53	Sedang	Sedang	Baik	34	34	34

Namun, secara per indikator di setiap lingkungan, terjadi juga dinamika perubahan peringkat antar tahun (**Tabel 5.**). Sebagai contoh, indikator yang mengalami kenaikan peringkat adalah Pendidikan Insan Pers dari peringkat 4 pada survei IKP 2019 menjadi peringkat 2 pada survei IKP 2020. Sedangkan yang



mengalami penurunan antara lain adalah indikator Kebebasan dari Kekerasan, dari peringkat 7 (2019) turun ke peringkat 12 (2020).

Demikian juga, terjadi dinamika peringkat IKP antar provinsi (**Tabel 6.**). Beberapa provinsi yang mengalami kenaikan peringkat signifikan antara lain adalah Maluku dari peringkat 26 ke peringkat 1, Sumatera Barat (24 ke 6), NTT (22 ke 6) dan Sumatera Utara (32 ke 15). Sedangkan provinsi yang mengalami penurunan peringkat IKP antara lain adalah Maluku Utara (15 ke 31), Sulawesi Tenggara (1 ke 25), Kalimantan Tengah (2 ke 21), dan Kalimantan Utara (4 ke 19).

Berdasarkan hasil IKP tahun 2017-2020 (lihat **Tabel 5.**), terdapat sembilan indikator yang memiliki peringkat hampir sama, yaitu pada:

1. Lingkungan Fisik dan Politik: Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (peringkat 1-2), Kebebasan Media Alternatif (peringkat 5-6), dan Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (peringkat 17-19).
2. Lingkungan Ekonomi: Keragaman Kepemilikan (peringkat 3-4), Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (peringkat 17-18), dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (peringkat 17-19).
3. Lingkungan Hukum: Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (peringkat 15-16), Etika Pers (peringkat 15-16), Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (peringkat 20).

Pada **Lingkungan Fisik dan Politik**, indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan memiliki peringkat tinggi pada survei IKP 2017-2020 karena tidak banyak ditemukan adanya intervensi perusahaan pers terhadap wartawan untuk mengikuti organisasi wartawan maupun serikat pekerja di daerah. Tetapi, hasil FGD NAC menunjukkan bahwa masih ada intervensi dari pemilik atau pemimpin perusahaan pers agar wartawan tidak bergabung pada suatu organisasi tertentu. Hal ini menjadi catatan untuk kebebasan berserikat bagi wartawan di media nasional khususnya.

Kemunculan media alternatif beriringan dengan penetrasi teknologi informasi secara nasional yang berpotensi mendapatkan informasi lebih cepat. Adanya konvergensi media yang memanfaatkan media sosial, serta akses internet dan infrastruktur di setiap provinsi di Indonesia yang berkembang merata, diharapkan membuka kran informasi lebih luas, termasuk bagi kelompok rentan.

Pada **Lingkungan Ekonomi**, indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat berada pada peringkat 17-18 pada survei IKP 2017-2020. Sumber pendapatan media di daerah sebagian besar masih berasal dari anggaran atau pendanaan dari pemerintah daerah. Hal ini memengaruhi independensi ruang redaksi dan kualitas pengelolaan perusahaan pers.

Pada **Lingkungan Hukum**, tiga indikator tidak mengalami perubahan peringkat pada IKP 2017-2020. Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, misalnya, berada pada peringkat 15-16, yang menunjukkan masih adanya kasus-kasus pers yang sejatinya bisa diselesaikan melalui UU Pers, tetapi diselesaikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara persoalan etika pers banyak terkait dengan

praktik wartawan menerima amplop meski ada yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak memengaruhi independensi kerja wartawan. Persoalan lainnya yang masih sering muncul adalah pemberitaan yang tidak sesuai etika jurnalistik, yaitu pemberitaan yang tidak berimbang, mengabaikan akurasi, dan sensasional.

Sementara itu, hasil IKP tahun 2017-2020 menunjukkan adanya satu indikator, yaitu Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas yang secara konsisten mengalami kenaikan skor. Pada IKP 2017, indikator ini mendapat skor 34,22, IKP 2018 mendapat skor 43,92, IKP 2019 mendapat skor 56,77, dan pada IKP 2020 mendapat skor 63,56. Meskipun terjadi kenaikan 6,79 poin dibanding IKP 2019, namun skor ini masih tetap berada dalam kategori “Sedang”.

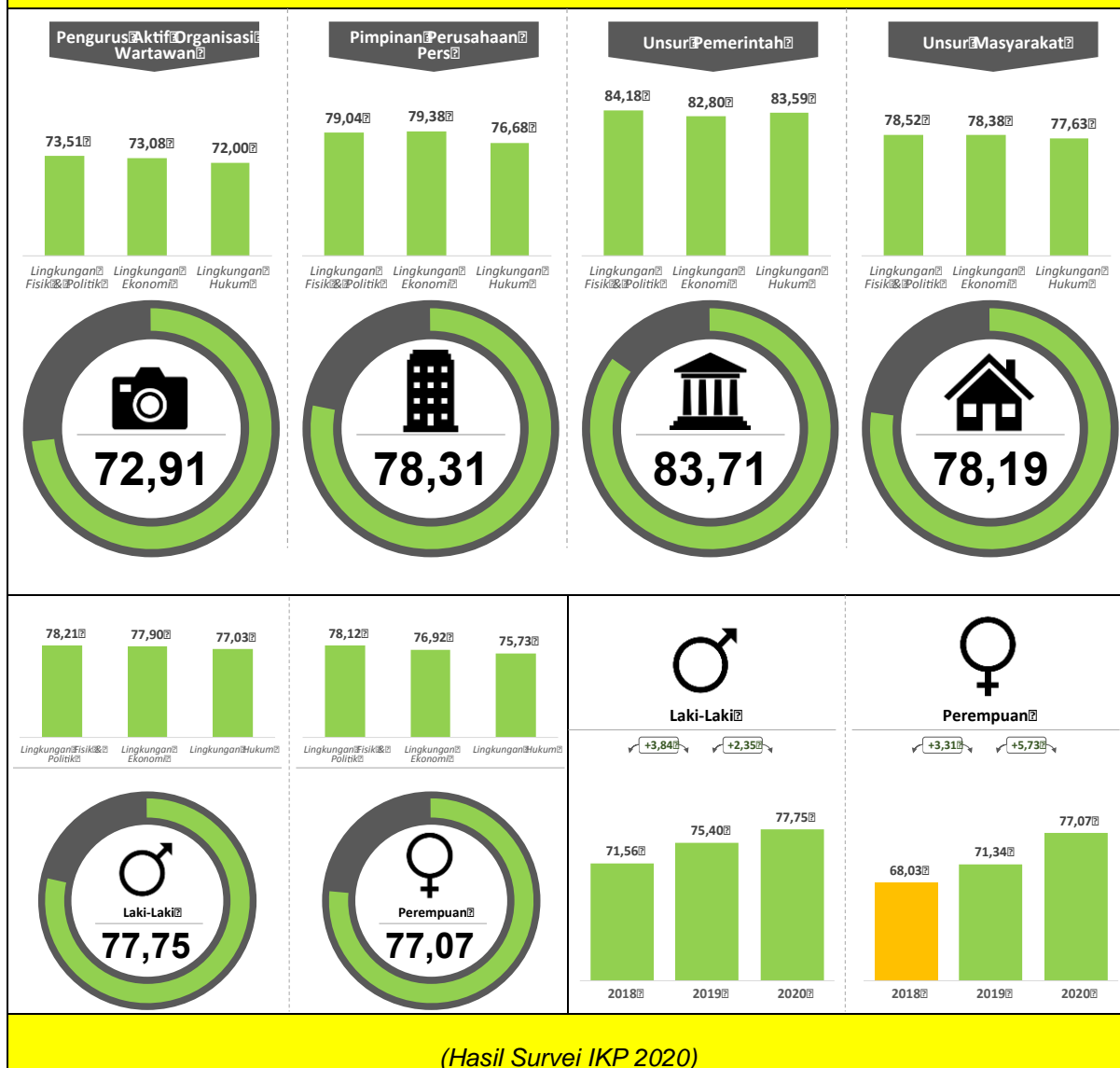
Persoalan indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas tak pernah tuntas diatasi. Selama empat tahun berturut-turut survei IKP dari 2017-2020, indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas selalu mendapat skor terendah dan menempati peringkat 20 (terbawah). Hal ini karena mayoritas IA memberi skor rendah pada pernyataan “*Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra*”.

Di sisi lain, indikator ini juga belum menjadi prioritas bagi perusahaan pers untuk menyediakan teknologi, dana, maupun sumberdaya manusianya. Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus dari semua *stakeholders* pers, untuk mendorong pers menjamin terpenuhinya hak akses atas informasi bagi warga difabel, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

## V. PERBANDINGAN NILAI INDEKS KEMERDEKAAN PERS ANTAR UNSUR RESPONDEN

Perbandingan nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2020 antar unsur responden menunjukkan bahwa nilai kemerdekaan pers yang diberikan oleh unsur pemerintah lebih tinggi dibandingkan unsur organisasi wartawan, perusahaan pers, maupun masyarakat. Sedangkan nilai kemerdekaan pers yang diberikan oleh responden laki-laki dan perempuan hampir sama (**Gambar 5.**).

- Hasil survei IKP 2020 menunjukkan nilai IKP terbesar (83,71) diberikan oleh Informan Ahli (IA) unsur pemerintah dan nilai terkecil (72,91) oleh IA unsur pengurus aktif organisasi wartawan, atau ada perbedaan nilai sebesar 10,8 poin.



**Gambar 5. Perbandingan Nilai IKP 2020 Antar Unsur Responden**

## VI. ISU-ISU UTAMA INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020

Isu-isu utama IKP 2020 (**Tabel 7, 8.**) didasarkan pada dua atau tiga indikator dengan skor terendah pada setiap lingkungan IKP dan skor tersebut berada di bawah rata-rata nilai IKP Nasional (75,27) sebagaimana dapat dirunut pada **Tabel 5**. Terlihat bahwa delapan indikator yang menjadi isu utama tersebut menempati peringkat bawah yaitu dari peringkat 13 sampai 20.

**Tabel 7. Isu-Isu Utama IKP 2020**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isu-isu utama IKP 2020 didasarkan pada dua atau tiga indikator dengan skor terendah pada setiap lingkungan IKP dan berada di bawah rata-rata nilai IKP Nasional (75,27).</li> </ul>
<b>Indikator Indeks Kemerdekaan Pers yang Menjadi Isu Utama</b>
<b>A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik</b>
1 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
2 Kebebasan dari Intervensi
3 Keragaman Pandangan
<b>B. Kondisi Lingkungan Ekonomi</b>
1 Tata Kelola Perusahaan yang Baik
2 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
<b>C. Kondisi Lingkungan Hukum</b>
1 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
2 Etika Pers
3 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
<i>(Hasil Survei IKP 2020)</i>

**Tabel 8. Indikator yang Menjadi Isu-Isu Utama IKP 2020**

No.	Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Skor Nasional	Peringkat
<b>A.</b>	<b>Kondisi Lingkungan Fisik &amp; Politik</b>		
1	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	71,96	17
2	Kebebasan dari Intervensi	74,96	14
3	Keragaman Pandangan	75,17	13
<b>B.</b>	<b>Kondisi Lingkungan Ekonomi</b>		
1	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	70,85	19
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	71,36	18
<b>C.</b>	<b>Kondisi Lingkungan Hukum</b>		
1	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	63,56	20
2	Etika Pers	73,77	16
3	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	74,41	15

Tiga indikator yang menjadi isu utama pada Lingkungan Fisik dan Politik, adalah: (1) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, (2) Kebebasan dari Intervensi, dan (3) Keragaman Pandangan. Sedangkan dua indikator yang menjadi isu utama pada Lingkungan Ekonomi, adalah: (1) Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan (2) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat. Sementara tiga indikator yang menjadi isu utama Lingkungan Hukum, yaitu: (1) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, (2) Etika Pers, dan (3) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.

Sebagai perbandingan, pada IKP 2019 dilaporkan ada tiga isu utama yaitu: (1) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, (2) Kesejahteraan Karyawan Pers, dan (3) Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat kemiripan isu-isu utama IKP 2019 dan IKP 2020, dan bahwa beberapa indikator mengalami kondisi permasalahan yang bersifat laten dan sistemik.

**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.** Media di daerah kurang memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, dan/atau kelompok minoritas. Contoh, dugaan kriminalisasi pada konflik lahan (agraria) antara perusahaan kelapa sawit dengan warga di Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang kurang mendapat perhatian media.

**Kebebasan dari Intervensi.** Hasil FGD IKP 2020 di beberapa provinsi menunjukkan bahwa intervensi masih ada dan kuat, baik dari pemerintah daerah maupun pemilik perusahaan pers. Pemerintah daerah melakukan intervensi melalui pemasangan iklan berbayar; dan pemilik perusahaan pers melalui penitipan pesan khusus yang menciptakan relasi dengan kekuasaan politik. Implikasi makna independen menjadi bersifat relatif atau 'bisa ditolerir'. Contoh bentuk tekanan, campur tangan, atau upaya sensor lainnya di tahun 2019, yaitu di Banten berupa pelarangan liputan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Cilegon bulan September 2019, di DKI Jakarta yang mana Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat adanya 33 kasus kekerasan terhadap wartawan sepanjang tahun 2019, dan di Papua di mana tiga wartawan Papua mendapat kekerasan, intimidasi, dilarang meliput, dan diusir saat hendak meliput pembukaan posko eksodus mahasiswa Papua di halaman Auditorium Universitas Cendrawasih bulan September 2019.

**Keragaman Pandangan.** Hasil survei IKP 2020 menunjukkan bahwa pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya mendorong keragaman isi pemberitaan yang ditunjukkan dengan adanya, antara lain, pelatihan bagi wartawan tentang kesetaraan gender dan ramah anak, keragaman kepemilikan media, dan larangan praktik diskriminatif terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya. Penilaian ini terutama ditemukan di Papua Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Papua.

**Tata Kelola Perusahaan yang Baik.** Pada indikator ini, persoalan yang paling banyak dibahas adalah kesejahteraan wartawan. Banyak wartawan di daerah yang tidak mendapat gaji ke-13 atau tunjangan hari raya (THR) setara upah minimum provinsi (UMP) dalam satu tahun, beserta jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur

dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers. Hal ini menyebabkan ketergantungan media pada dana pemerintah daerah, maraknya praktik amplop, dan penerimaan bantuan dari pihak lain yang dapat mengganggu independensi wartawan.

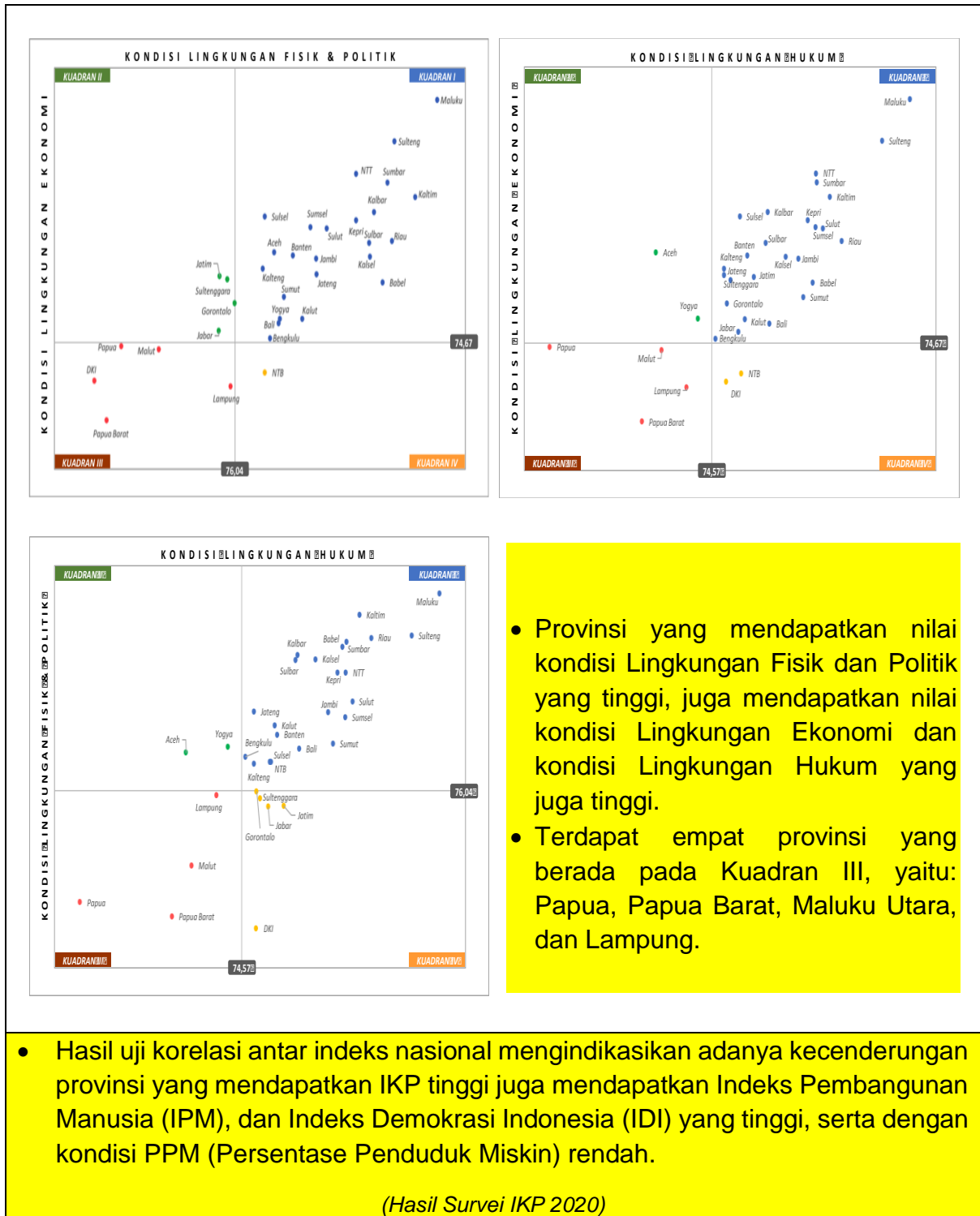
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.** Hasil IKP 2020 menunjukkan bahwa praktik amplop masih banyak terjadi di daerah, meski Informan Ahli dari unsur pemerintah daerah menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan memengaruhi isi pemberitaan. Di beberapa daerah bahkan disinyalir, praktik amplop makin banyak terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah media siber. Praktik amplop juga terjadi karena perusahaan pers dinilai belum mampu mengupah wartawannya dengan layak. Meski demikian, beberapa pemerintah daerah telah melakukan edukasi dan sosialisasi pada wartawan akan kebijakan pemerintah untuk tidak memberikan amplop, seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bali, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.** Rendahnya skor indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas tidak terlepas dari masih minimnya upaya pemerintah daerah dalam mendukung pemberian akses informasi bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah di banyak provinsi tidak menyiapkan aturan yang mewajibkan media pers menyediakan akses. Kalaupun ada, pemerintah daerah berkalah tak bisa memaksa media untuk mengikuti aturan itu. Hanya media yang memiliki pendapatan besar yang mampu menyediakan akses atau media yang memiliki komitmen kuat meskipun memiliki keterbatasan finansial dan sumber daya manusia. Selain itu, belum adanya teknologi yang murah dan mudah, juga membuat banyak media lokal sulit menyediakan akses informasi bagi penyandang disabilitas.

**Etika Pers.** Patuh atau tidaknya wartawan terhadap etika pers dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah minimnya pelatihan yang didapat, rendahnya gaji yang diperoleh, tidak tegasnya media memberikan sanksi pada wartawan yang melanggar etika, dan praktik media yang bersikap tidak profesional di mana perusahaan pers mewajibkan wartawannya mencari iklan selain meliput berita.

**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.** Adanya berbagai kasus yang terkait dengan sengketa pers yang tidak diselesaikan sesuai UU Pers kemudian masuk ke ranah peradilan, membuat kekhawatiran bagi insan pers di sejumlah daerah. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dianggap sebagai ancaman yang bisa dipakai menghambat kemerdekaan pers. Dewan Pers telah menerima hampir 70 permintaan ahli pers untuk kasus-kasus sengketa pers yang diajukan, baik oleh polisi maupun pengadilan sepanjang 2019. Meskipun Dewan Pers telah memiliki nota kesepahaman dengan lembaga peradilan bahwa sengketa pers akan ditangani melalui mekanisme UU Pers, tetapi posisi indikator Kepastian Hukum Lembaga Peradilan tetap saja berada pada posisi “bawah” IKP 2020.

## VII. KETERKAITAN ANTARA INDEKS KEMERDEKAAN PERS DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, INDEKS DEMOKRASI INDONESIA, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 2019 SECARA NASIONAL



- Provinsi yang mendapatkan nilai kondisi Lingkungan Fisik dan Politik yang tinggi, juga mendapatkan nilai kondisi Lingkungan Ekonomi dan kondisi Lingkungan Hukum yang juga tinggi.
- Terdapat empat provinsi yang berada pada Kuadrant III, yaitu: Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Lampung.

- Hasil uji korelasi antar indeks nasional mengindikasikan adanya kecenderungan provinsi yang mendapatkan IKP tinggi juga mendapatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tinggi, serta dengan kondisi PPM (Persentase Penduduk Miskin) rendah.

(Hasil Survei IKP 2020)

**Gambar 6. Kuadran Antar Nilai Kondisi Lingkungan IKP**

Gambaran kuadran antar nilai kondisi lingkungan kemerdekaan pers: (1) Ekonomi versus Fisik dan Politik, (2) Ekonomi versus Hukum, dan (3) Fisik dan Politik versus Hukum dibuat dengan titik batas antar kuadran, adalah rata-rata nilai kondisi lingkungan nasional. Berdasarkan kuadran tersebut, terdapat empat provinsi—Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Lampung—yang menempati Kuadran III, yaitu pada posisi dengan nilai kondisi lingkungan kemerdekaan pers lebih rendah dari rata-rata nasional (**Gambar 6.**).

Hasil uji korelasi (**Tabel 9.**) mengindikasikan adanya kecenderungan bahwa suatu provinsi yang mendapatkan IKP tinggi juga mendapatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tinggi, serta dengan kondisi Persentase Penduduk Miskin (PPM) rendah. Kondisi ini dapat menjadi masukan bagi perbaikan yang sifatnya lebih komprehensif pada berbagai aspek yang saling terkait dalam menciptakan kondisi kemerdekaan pers Indonesia yang lebih baik.

**Tabel 9. Uji Korelasi Pearson Antara IKP dengan IDI, IPM, dan PPM Tahun 2019 secara Nasional (Sumber data: BPS 2020)**

INDEKS LAINNYA  INDEKS KEBEBASAN PERS (IKP)		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) per Aspek			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pesentase Penduduk Miskin (PPM) (Sep 2019)
		Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-Hak Politik	Aspek Lembaga Demokratik		
1	Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik	0,08	0,26	0,21	0,07	-0,28
2	Kondisi Lingkungan Ekonomi	0,13	0,14	0,00	-0,03	-0,11
3	Kondisi Lingkungan Hukum	-0,03	0,29	0,26	0,26	-0,45
4	IKP				0,12	-0,33

*Hasil Uji menunjukkan adanya korelasi yang tergolong lemah ( $|r| \leq 0,29$ ) sampai moderat ( $0,30 \leq |r| \leq 0,49$ )*



## VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020

### KESIMPULAN

1. Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2020 nasional 75,27 mengalami kenaikan tipis sebanyak 1,56 poin dari IKP 2019. Kategori kemerdekaan pers yang sebelumnya “Agak Bebas” pada IKP 2016-2018 naik kelas menjadi “Cukup Bebas” pada 2019-2020.
2. Persoalan-persoalan yang muncul pada Lingkungan Fisik dan Politik, Ekonomi, dan Hukum, yaitu:
  - a. Beberapa partai politik dan politisi menjadikan media massa sebagai kendaraan politik, di mana penggiringan opini kerap dilakukan melalui media milik pemimpin partai untuk menguntungkan kelompoknya. Ini menyebabkan pemberitaan di media menjadi kurang akurat, berimbang, dan cenderung eksploitatif. Selain itu, perusahaan pers menjadi tidak independen dan tata kelola perusahaan kurang baik.
  - b. Pada masa tahun politik 2019, terjadi kekerasan terhadap wartawan di beberapa daerah, seperti di DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
  - c. Kemunculan media alternatif, khususnya media siber, yang cukup banyak di Indonesia tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas wartawan maupun jurnalis warga yang memanfaatkannya, sehingga memengaruhi kualitas pemberitaan yang tidak mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan keadilan, serta bersifat instan. Juga ditemukan, banyak wartawan yang kurang menjunjung tinggi etika pers sehingga melunturkan kepercayaan masyarakat pada media massa.
  - d. Fakta yang terjadi di banyak daerah, seperti di Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Papua, seorang pendiri perusahaan media siber juga merangkap sebagai pemimpin redaksi, wartawan, dan pencari iklan. Hal ini berdampak pada pengabaian kaidah jurnalistik, mulai dari proses melakukan kegiatan jurnalistik sampai pada pemberitaan yang dihasilkan.
  - e. Perusahaan pers masih tergantung pada pemerintah daerah dalam hal pendanaan dan pendapatan media yang menyebabkan rendahnya akurasi, keberimbangan, dan verifikasi berita, serta terganggunya independensi ruang redaksi.
  - f. Di banyak daerah, perusahaan pers tidak dapat memenuhi paling sedikit 13 kali gaji setara upah minimum provinsi (UMP) dalam satu tahun.
  - g. Masih adanya intervensi pemilik perusahaan pers dan pemerintah daerah terhadap kebijakan redaksi, termasuk pada penyediaan ruang pemberitaan bagi kelompok rentan.



6. Dewan Pers mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Kapolri untuk memperkuat implementasi Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian RI tahun 2017 tentang Perlindungan Kemerdekaan Pers sebagai mekanisme hukum baku penanganan proses hukum atau sengketa jurnalistik di Indonesia.
7. Dewan Pers mendorong penegakan peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, terutama mengenai pengupahan dan kesejahteraan wartawan. Jika ada perusahaan pers yang tanpa alasan kuat tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka verifikasi media dicabut.
8. Dewan Pers melakukan pendataan dan pemetaan media siber yang terus mengalami pertumbuhan jumlah sebagai upaya mewujudkan tata kelola media siber nasional yang baik.
9. Dewan Pers bekerjasama dengan pemerintah daerah mendorong perusahaan pers untuk menyediakan teknologi, dana, maupun sumber daya manusia guna menjamin terpenuhinya hak akses atas informasi bagi penyandang disabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).